

PEMBUNUHAN DI MAUMERE : Kewarganegaraan Pascapenjajahan¹

Gerry van Klinken.

Abstract:

This essay examines citizenship struggles in the small Indonesian town of Maumere during two decades of intensive state formation after decolonization in 1945. These struggles culminated in the bloody anticommunist purges of late 1965 and early 1966, which in this area mainly reflected “ethnic” tensions. They should not be seen merely as evidence of a deeply divided society, of elite factional fights over resources, or of state institutions that were too weak to exert effective control over society (though all those observations have some truth as well). Rather they were contentious efforts to establish new forms of public authority in the broad space between state and society.

Novel informal institutions and rituals developed in the interstices between state and society. Christian Lund has called them “twilight institutions”. They all aimed to include ordinary people in public affairs. They were clientelistic, and their rivalry sometimes produced violence. Yet they were essentially about bringing ordinary people into a productive relationship with the new state; that is, they were about citizenship. The greatest irony of the “twilight institutions” is that they only became instruments of total exclusion after the central state began to assert itself decisively also in small provincial towns such as this. The history of “twilight institutions” continues to impress itself on actually existing forms of citizenship in the provinces today.

Kata-kata kunci: Jan Djong, Maumere, perjuangan demokrasi, demonstrasi, ketegangan etnis, ketegangan politik, pembantaian politik 1966.

1. Disampaikan sebagai pidato pengukuhan pada pengangkatan penulis sebagai Guru Besar Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia Tenggara di Universitas Amsterdam pada tanggal 2 Oktober 2013. Diterbitkan di sini atas seizin penulis.

Jan Djong tewas di penjara Maumere lantaran luka-luka yang dideritanya, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 1966. Maumere adalah sebuah kota kecil di pantai utara Flores, sebuah pulau di kawasan timur Indonesia. Maumere, ketika itu, berpenduduk hanya 2.000 jiwa. Jan Djong barusan berusia 48 tahun. Ia adalah politisi paling energik dari wilayah pertanian ini. Setelah ditangkap pada akhir Januari atau awal Februari 1966, ia dipukuli, kemudian diarak keliling kota kecil nan terik itu dengan berjalan kaki bersama dengan beberapa tokoh kawakan lainnya. Mereka semua ditelanjangi. Tali kolornya diambil sehingga celana dalamnya terus melorot. Dari waktu ke waktu selama bulan berikutnya, para tahanan tersebut disuruh berbaris kodok dalam antrean dari penjara di belakang kantor polisi ke markas militer setempat yang terletak dua kilometer ke arah timur untuk diinterogasi. Keluar di pagi hari, kembali pada sore hari. Para penyiksa mereka yang terus melontarkan ejekan memerintahkan mereka untuk bernyanyi dan menari sepanjang jalan, sehingga orang-orang memar lebam itu hanya bisa maju terhuyung-huyung tak karuan. Akhirnya, merasa ajal sudah dekat, Jan Djong yang beragama Kristen Katolik itu meminta para sipir penjara memanggil seorang pastor agar ia boleh membuat pengakuan dosa dan menerima sakramen minyak suci. Mereka menolak. Salah satu dari mereka mengencingi wajahnya. Ia dikuburkan di lapangan penjara. Para penyiksa Djong adalah warga sipil, orang lokal beragama Kristen Katolik seperti dirinya, yang bekerja di berbagai kantor dinas pemerintah. Mereka semua kenal satu sama lain. Setelah peristiwa ini, sekitar 800 orang lainnya ditangkap di seantero wilayah pedesaan di Sikka. Truk-truk berdatangan dari segala arah menuju sebuah lubang besar di tanah yang digali di tengah-tengah perkebunan kelapa milik Misi Katolik di Maumere. Mereka semua dibunuh tanpa interogasi.

Ada Apakah Gerangan?

Pembunuhan politik sayangnya menjadi menu berita harian. Cerita Jan Djong dari tahun 1966 itu bisa berulang di kantor polisi Kairo pada Agustus 2013 yang menahan para anggota Ikhwanul Muslimin, atau di Pakistan, atau di Republik Demokratik Kongo. Masyarakat politik pascapenjajahan dan pascaotoriter terus menyaksikan banyak tindak

kekerasan. Bila ditilik dari luar, kita cenderung untuk mengatakan bahwa entah berbagai masyarakat ini sangat terpecah, atau bahwa lembaga-lembaga negara mereka lemah, atau dua-duanya. Penduduk yang terbelah oleh kesetiaan perpuakan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Masyarakat sipil lemah. Kebanggaan akan suku sendiri mencekik budaya toleransi yang dituntut paham kewarganegaraan. Masyarakat yang sangat plural dengan cepat bergeser ke ambang perang saudara jika tangan kuat dari pusat melemah. Justru tangan kuat itulah yang dilenyapkan dalam kondisi pascapenjajahan dan pascaotoriter. Lembaga-lembaga negara sumir dan tidak efektif, sekaligus tidak dapat menyalurkan ledakan-ledakan kekecewaan yang tercipta selama perjuangan melawan penjajahan. Masyarakat menjadi tidak bisa diatur dan tidak bisa diperintah.

Jelas bahwa ada banyak yang benar menyangkut pandangan dari luar ini. Tapi banyak juga yang salah. Dua hal tampak paling jelas salah. Salah satunya ialah bahwa pandangan ini cenderung menghasilkan rekomendasi-rekomendasi otoriter. Nama Samuel Huntington selamanya dikaitkan dengan gagasan bahwa penguatan lembaga-lembaga negara mesti lebih diutamakan daripada mengundang partisipasi publik yang lebih luas. Para jenderal yang mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965 menemukan ide ini sedemikian menariknya. Mereka itulah yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian Jan Djong. Para jenderal saat ini di Mesir berpikir dengan cara yang sama belaka.

Pandangan dari luar tadi tampaknya salah pada tingkat yang lebih dalam juga. Bahasanya sepenuhnya negatif – negara lemah, masyarakat yang sangat terpecah. Ini adalah sebuah analisis negara dalam kerangka apa yang bukan. Ia menghasilkan analisis yang mandul dan sarat celaan. Jika hanya itulah yang dapat kita sajikan sebagai penjelasan, maka berapa banyak yang benar-benar kita pahami tentang aneka masyarakat ini?

Sebagian besar rekan-rekan saya adalah para antropolog, dan mereka selalu mencoba untuk mengambil pandangan dari dalam. Mereka bertanya 'Apa yang benar-benar orang katakan?' Pertanyaan yang sangat bagus. Hari ini saya ingin membawa Anda menemani saya untuk mendengarkan cerita Jan Djong tersebut dari dalam.



Foto diambil di Denpasar ketika mengikuti Latihan Kemiliteran Pertahanan Sipil (LKPS) tahun 1950. Dari kiri: Djuang da Costa (wakil Paga), Filipus Muda Meak (wakil Nita), Jan Djong (wakil Kanga'e), Stef Leong Liwu (wakil Kanga'e).

Apa Kata Mereka?

Kita mundur lebih dari 12 tahun sebelum adegan mengerikan yang menjadi awal kisah kita pada Maret 1966, yaitu ke tanggal 19 Juni 1953. Ketika itu saya berusia satu tahun di Rotterdam, dan Jan Djong berusia 36 tahun. Kematian itu jauh dari benaknya. Kota kecil Maumere adalah kawasan dengan bangunan-bangunan rendah sepanjang sekitar tiga kilometer di pantai utara di bagian tengah Flores. Maumere menjadi bagian Republik Indonesia tiga tahun sebelumnya; kota itu adalah ibukota kabupaten bernama Sikka. Hampir setengah pekerjaannya adalah kalangan militer dan pegawai negeri sipil. Setengah lainnya bekerja di bidang perdagangan dan industri kecil yang melayani bidang pertanian di pedalaman kabupaten itu – terutama pengolahan minyak kelapa. Pada zaman penjajahan, Maumere adalah takhta Raja Sikka. Belanda menunjuk raja-raja 'tradisional' sebagai cara memerintah yang lebih murah daripada pemerintahan modern. Belanda beranggapan bahwa raja-raja itu populer, namun pada kenyataannya mereka berperilaku dengan cara-

cara sangat otokratis yang semakin tidak sejalan dengan era demokratisasi. Republik Indonesia mempertahankan jalur keturunan Raja Sikka ini, tetapi hanya sebagai langkah sementara; keberadaan raja bertentangan cita-cita sebuah republik.

Jan Djong marah. Selama masa pendudukan Jepang, ia diangkat ke posisi kepala desa. Tapi setelah kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945, raja memecatnya dari posisi tersebut. Ia mulai melakukan hasutan melawan sang raja. Pada tahun 1953 ia mengadakan sebuah 'demonstrasi'. Ia mendapat ide itu dari seorang pemuda bernama V.B. (Sentis) da Costa, seorang mahasiswa hukum yang sedang belajar di kota besar Makassar, yang terletak sejauh satu hari pelayaran dari Maumere. Sentis da Costa sedang berlibur di rumah orangtuanya ketika itu, dan ia menyukai kenekatan Jan Djong ini. Para demonstiran waktu itu termasuk para siswa/i dari SMP Yapenthom yang didirikan Raja Sikka.² Itu adalah demonstrasi pertama yang pernah diadakan di kota kecil itu.³ Anak-anak muda tadi membeli tikar murah dari daun kelapa di pasar tua di timur pusat kota Maumere, lalu memotongnya menjadi dua guna menghemat uang, dan dituliskan slogan mereka pada tikar-tikar itu dengan kapur tulis. Frasa Latin berasal dari kuliah hukum Sentis da Costa.

Moto: *Regnat Populus* = Rakjat Memerintah
Lenjapkanlah Radja
Ada Radja = Ada Pendjadjahan
Ada Radja = Ada Perbudakan
Di Mana Ada Raja, Di Sana Ada Perbudakan
Demokrasi + Radja = [dicoret ½] Hampir 0.

Apa yang para demonstiran ini inginkan? Tampaknya sangat jelas. Mereka ingin menjadi warga dalam sebuah negara yang juga menjadi milik

2 Yayasan Pendidikan Thomas (Yapenthom) didirikan pada tahun 1947, dan SMP Yapenthom dibuka di Maumere pada tahun 1949. Selain Seminari Menengah Mataloko, Yapenthom adalah sekolah lanjutan pertama di Flores.

3 "Permohonan idzin guna mengadakan satu demonstrasi", surat dari J. Djong, P. Padang dan V.B. da Costa, kepada Jth. Bapak Kepala Pemerintahan Setempat, dan Kpd Jth. Bapak Kepala Kepolisian Setempat, tertanggal Maumere, Djuni 1953.

mereka. Ini adalah pemikiran yang menarik lagi radikal. Para penjajah Belanda tidak mendukung ide-ide tentang kewarganegaraan semacam ini. Tidak pula Raja Sikka. Banyak warga kota Maumere berpikir bahwa para demonstran memamerkan sejenis pembangkangan yang mengejutkan. Revolusi di Jawa kini menyambang ke Flores. Tapi orang-orang muda ini justru menginginkan hak-hak yang hanya dimiliki para warga negara.

Tuntutan para warga di negara-negara yang barusan merdeka untuk ambil bagian dalam negara mereka bertumbuh sangat pesat sejak saat itu. Mereka inilah yang menciptakan Musim Semi Arab. Hari ini tidak mungkin lagi membayangkan sebuah dunia di mana para warga tidak menuntut partisipasi. Masalah pemerintahan telah menjadi semakin kompleks, dan ada godaan kuat untuk menerapkan rekomendasi Huntington. Namun kita jarang mempelajari kewarganegaraan di negara-negara pascapenjajahan; dan hal itu bisa menjelaskan mengapa kita merasa begitu sulit untuk memahaminya.

Kewarganegaraan Pascapenjajahan

Mari kita jujur. Cita-cita kewarganegaraan di antara orang-orang tak berpendidikan di sebuah kota kecil dengan nyiur melambai yang terbilang terpencil lagi miskin itu, 60 tahun silam – ‘agak sukar untuk digubris’ – ini adalah reaksi orang sok modern. ‘Mereka mungkin berbicara tentang kewarganegaraan, tetapi apakah mereka benar-benar mengetahui artinya? Apakah mereka siap untuk itu? Secara budaya, politik, ekonomi?’ Namun seluruh Republik Indonesia – yang lahir dari pertumpahan darah melalui bentangan revolusi 1945-1949 – adalah hasil akhir dari perjuangan kewarganegaraan oleh jutaan orang miskin. Revolusi itu juga mengilhami para petani dan pelajar di kota kecil Maumere yang terik itu. Eric Wolf menegaskan dalam bukunya *Europe and the People Without History* (1982) bahwa seluruh dunia kini telah terpadu selama berabad-abad oleh dinamika antara pasar-pasar kapitalis dan negara-negara modern. Saya memiliki ilustrasi yang bagus tentang hal itu. Salah satu pendukung gigih Jan Djong, seorang lelaki yang dijuluki ‘Alo Gila’, mengenakan tiruan jenggot kambing ala Patrice Lumumba. Lumumba adalah martir tampan yang memperjuangkan kemerdekaan Kongo tahun 1961 – ingat novel

The Poisonwood Bible. Keinginan untuk menjadi warga negara adalah salah satu daya dorong politik yang paling mendasar dalam sebuah dunia yang saling terkait seperti itu.

Alasan yang lebih arif mengapa kita mungkin sungkan berbicara tentang kewarganegaraan dalam kasus Jan Djong ialah bahwa kewarganegaraan adalah konsep yang secara inheren bercorak normatif dan terutama lagi merupakan konsep Barat. Kita tidak boleh memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain. Sebuah perasaan yang bagus, tapi saya hendak mengatakan dua hal untuk itu. Pertama, hampir semua konsep yang kita gunakan dalam diskusi politik setiap hari bercorak normatif – demokrasi, hak asasi manusia, akuntabilitas, legitimasi. Bahkan kata ‘negara’ adalah sebuah konsep normatif yang menyiratkan bahwa bangsa-bangsa harus diperintah melalui lembaga impersonal. Semua konsep ini saling terkait. ‘Tidak ada kewarganegaraan tanpa hak,’ tandas Hannah Arendt. Jika kita menolak memakai kata-kata ini maka kita tidak akan dapat mengatakan apa pun juga. Keberatan saya yang kedua terhadap keberatan normatif ialah bahwa Jan Djong pasti setuju dengan Hannah Arendt. Saling keterkaitan global ala Eric Wolf juga berarti bahwa ide-ide dan norma-norma berkelana – terutama ide-ide dan norma-norma yang memberdayakan. Tinggal di Maumere tidak menafikan seorang untuk bergabung di dalamnya.

Baiklah, jadi kita bisa bicara tentang kewarganegaraan jika Jan Djong ingin membicarakannya. Tapi masih adalah masalah. Jika kita tidak berhati-hati maka hal yang sama akan terjadi dengan ‘kewarganegaraan’ seperti yang telah terjadi pada diskusi kita tentang masyarakat sipil atau negara dalam kondisi pascapenjajahan, yaitu bahwa orang Indonesia tidak memenuhi norma. Bagaimana kita dapat sekali lagi menghindari ihwal menemukan sekadar ‘gugusan ketiadaan’?⁴

Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan itu kita memerlukan sedikit kejelasan lebih lanjut tentang arti kata kewarganegaraan itu. Ada banyak perpustakaan yang dipepaki buku-buku tentang hal ini, tapi saya berharap bahwa satu definisi sederhana darinya dan dua catatan kaki sudah memadai

4 Engin F. Isin dan Bryan S. Turner (ed.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage, 2002, hlm. 2.

untuk saat ini. Pusat untuk semua definisi tentang kewarganegaraan ialah bahwa kata itu mengacu pada sebuah relasi antara seorang dan sebuah komunitas politik. Itu adalah definisi darinya. Kata kuncinya adalah *relasi*. Catatan kaki pertama ialah bahwa relasi itu ditandai berbagai hak dan kewajiban timbal balik. Dengan kata lain, relasi itu adalah semacam kontrak sosial yang dapat diberlakukan dan diwujudkan melalui sebuah cara yang menafikan pertimbangan pribadi. Catatan kaki kedua ialah bahwa relasi itu diaktifkan oleh peran yang dimainkan seorang dalam kehidupan politik masyarakat tersebut. Artinya, relasi itu menyangkut interaksi sehari-hari, dan bukan hanya ide-ide yang bagus.

Jadi bagaimana kita bisa menghindari jebakan aneka prasangka ketika kita beralih untuk mempelajari kewarganegaraan pascapenjjajaan? 'Relasi' adalah kata kunci dalam definisi kita. Kewarganegaraan di sebuah negara pascapenjjajaan adalah masalah pengamatan empiris, dan bukan sekadar sebuah definisi. Kita perlu mempelajari relasi itu di lapangan. Kita harus mempelajarinya secara historis dan antropologis. Jadi, jika kita menerima bahwa Jan Djong dan kawan-kawannya ingin menjadi warga negara dalam sebuah republik, maka kita harus bertanya: Apa yang mereka maksudkan dengannya? Praktik-praktik apakah yang mereka kembangkan untuk mengejar cita-cita itu? Relasi apakah yang mereka bentuk sebagai akibat darinya? Jawabannya tidak tersedia kecuali kita pergi dan bertanya. Studi tentang kewarganegaraan adalah sebuah ilmu empiris – Anda harus mampu berbicara dalam bahasa setempat.

Demonstrasi

Mari kita kembali ke kisah awal kita dengan wawasan penting ini di benak kita. Johannes ('Jan') Djong lahir tahun 1917 di sebuah kampung nan indah di wilayah perbukitan di sebelah tenggara Maumere. Aneka megalit tinggi untuk para leluhur dibangun di tengah deretan rumah besar dan rapi yang dihiasi banyak lukisan. Belanda baru bisa menguasai wilayah itu hanya 30 tahun sebelumnya. Pada tahun Jan Djong lahir, hanya ada dua pejabat Belanda yang mewakili pemerintah pusat di Sikka. (Selusinan lebih biarawati Belanda juga berserakan di wilayah itu). Alih-alih memperkenalkan negara modern impersonal, Belanda menunjuk para

raja yang sudah memiliki pengaruh tertentu di sana. Mereka melakukan hal ini di sebagian besar wilayah di luar Jawa. Penduduk para raja ini tetap sebagian besar tanpa hak. Seluruh wilayah Flores tengah itu ditaruh di bawah kekuasaan Raja Sikka. Pemerintahan tidak langsung terbilang tidak mahal.

Dalam satu dasawarsa, Belanda telah menetapkan bahwa kopra adalah jawaban untuk kurangnya surplus yang diproduksi oleh sistem ekonomi subsisten di wilayah itu. Para raja otokratis ini memaksa penduduk desa untuk menanam kelapa. Pajak kelapa dibayar untuk membangun ruas jalan dan permukiman baru. Para raja juga memfasilitasi jaringan sekolah-sekolah Katolik baru.

Kampung halaman Jan Djong berada di sebuah kerajaan kecil tetangga bernama Kangaé. Perang kecil-kecilan di antara wilayah-wilayah yang saling bersaing kerap meletus, dan campur tangan Belanda pada awalnya memicu episode baru tindak kekerasan dan kemudian lebih intens. Pada tahun 1900 pecah pertempuran antara Sikka dan Kangaé. Untuk



*Frans Cornelissen, SVD, Direktur Seminari Mataloko, membantu Jan Djong (sekitar 1930).
Foto: Arsip Provinsi SVD Ende, Buku I, No.04680.*

menenangkan orang Kangaé, pada tahun 1902 Residen Belanda menaikkan status penguasanya ke tingkat Raja. Tapi tahun berikutnya Kangaé sekali lagi menyerang tetangga Sikka mereka. Seorang prajurit bernama *Mo'ang* Teka menggerebek wilayah Sikka sebagai protes terhadap upeti yang masih dituntut Sikka. Huru-hara ini berubah menjadi perang saudara; banyak desa dibakar rata tanah. Teka bersama 90 orang bersenjatakan senapan memasuki Maumere. Setelah Belanda berhasil menata kembali ketertiban di kota itu, mereka mengirim Kapten Christoffel, yang namanya terkenal lantaran kampanye pasifikasi di seantero nusantara, ke wilayah perbukitan tadi untuk memadamkan pemberontakan itu hingga tuntas. Raja Kangaé dilengserkan dan kekuasaan dipusatkan ke tangan Raja Sikka yang penuh semangat, Don Thomas Ximenes da Silva. Merasa aman lantaran mengetahui bahwa Belanda akan mendukungnya terhadap protes apa pun, maka ia menunjuk para kepala yang sama-sama otokratis di semua kampung untuk mengumpulkan pajak baginya. Sebagian besar adalah sanak kerabatnya. Kaum elite Kangaé merasa dikecewakan.

Siapa pun yang menginginkan perubahan niscaya mesti menentang sistem monolitik raja dan Gereja. Itulah yang dihadapi Jan Djong. Demonstrasi tanggal 19 Juni 1953 itu adalah sebuah momen penting. Momen ini memperkenalkan salah satu ritus utama kewarganegaraan modern ke kota kecil bernama Maumere itu. 'Demonstrasi' boleh jadi telah diciptakan pada abad ke-19 oleh Sang Pembebas Irlandia, Daniel O'Connell. Ini adalah ekspresi kedaulatan rakyat yang pantang tindak kekerasan, suatu bentuk protes sah dalam sebuah demokrasi yang taat hukum. Sentis da Costa menyarankan kepada Jan Djong bahwa alternatif yang baik terhadap aksi bakar dan baku pukul anarkis, seperti terjadi pada 1948, adalah 'demonstrasi benaran. Ini demo pertama di seluruh Flores; di Makassar sudah sering'.⁵

Demonstrasi Jan Djong pada tahun 1953 itu selaras dengan tuntutan yang kian merebak akan sebuah pemerintahan di mana setiap orang memiliki hak yang setara. Bahkan banyak PNS Katolik ternama di Flores tengah ketika itu berbicara tentang bahasa 'pemberontakan'. Sebagian

5 Wawancara dengan V.B. da Costa, Jakarta, tgl. 19 Agustus 2010.

besar kemarahan mereka diarahkan melawan hak-hak istimewa sang raja. Bahkan Flores yang terisolasi secara budaya menyadari bahwa Republik Indonesia tidak menyetujui hak turun-temurun para raja untuk menapak kekuasaan yang kebal pertanggungjawaban. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengatakan dalam sebuah kunjungannya via udara ke Lombok pada tahun 1952 bahwa 'tuan-tuan tanah merupakan penghalang-penghalang jang terutama untuk kemajuan negeri.'⁶ Tanah dimiliki secara komunal di Flores, tapi mereka yang disebut para 'tuan tanah' itu mengendalikan penggunaan atas tanah, dan kendali itu adalah hak istimewa feodal. Sebuah majalah berita Katolik setempat pernah menerbitkan beberapa artikel kritis tentang para tuan tanah itu. Seorang pegawai muda kantor pos menulis: 'berantaslah adat tuan-tuan tanah jang kuno itu!!'⁷ Seorang lain menulis: 'Hapuskanlah feodalisme di Flores!'⁸

Demonstrasi adalah sebuah lembaga informal untuk menyalurkan tuntutan rakyat. Perhatikan kata itu – lembaga informal. Siapa pun yang mulai mempelajari kewarganegaraan dalam sebuah masyarakat pascapenjajahan akan menemukan banyak lembaga informal semacam itu. Ketika orang-orang mengatakan bahwa 'lembaga-lembaga negara lemah' dalam masyarakat pascapenjajahan atau pascaotoriter, mereka biasanya memaksudkan bahwa ada banyak lembaga informal. Sebuah lembaga informal didefinisikan sebagai 'aturan-aturan yang dipunyai bersama secara sosial, biasanya tidak tertulis, yang dibuat, disampaikan dan ditegakkan di luar saluran-saluran sanksi resmi. Sebaliknya, lembaga-lembaga formal mengandung berbagai aturan dan prosedur yang dibuat, disampaikan dan ditegakkan melalui saluran-saluran yang secara luas dianggap resmi.'⁹ Demonstrasi adalah sebuah lembaga informal. Kebanyakan mereka yang ambil bagian dalamnya mungkin memiliki gagasan tertentu tentang apa yang seharusnya, namun tak ditemukan di mana pun sebuah hukum formal yang mengaturnya.

6 "Kunjungan Wk. Presiden Hatta", *Bentara*, 15 Mai 1952.

7 "Soal tuan-tuan tanah", *Bentara*, 1 Juli 1952.

8 "Hapuskanlah feodalisme di Flores!", *Bentara*, 15 November 1952.

9 Gretchen Helmke dan Steven Levitsky, 'Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda', *Perspectives on Politics* 2/4 (2004):hlm.725-740, kutipan dari hlm. 727.

Salah satu pertanyaan kunci kita adalah: Bagaimana lembaga-lembaga formal dan informal ini saling terkait? Terlalu sering kita berandai bahwa praktik-praktik informal menggerogoti praktik-praktik formal, dan karenanya menyebabkan nilai rendah yang didapat kewarganegaraan pascapenajahan. Tapi, seperti akan kita lihat, andaian ini sama sekali tidak selalu dapat diabsahkan. Kadang-kadang keduanya bekerja secara luas menuju tujuan yang sama. Tentu saja tampaknya itulah yang menjadi kasus di sini.

Benarkah? Sebab tidak semua orang di Maumere setuju bahwa demonstrasi yang adalah ungkapan kedaulatan rakyat yang modern lagi pantang kekerasan. Pembicaraan populer tentang ‘pemberontakan’ menyiratkan sesuatu tentang haus darah ala Revolusi dari Jawa. Bahkan Sentis da Costa sendiri tampaknya sedikit tidak yakin. Ketika mahasiswa muda hukum itu berorasi di hadapan khalayak di depan kantor pemerintah Sikka pada hari itu, ia berupaya mencari jalan tengah antara Daniel O’Connell¹⁰ dan *Mo’ang* Teka. Kenang Sentis:

Demo keliling kota, ditahan di depan kantor pemerintah. Djong dan Padang tidak ikut. Saya yang pimpin. Saya langsung naik panggung, bicara. Orang dorong polisi lalu kita masuk pekarangan, masuk kantor. Tapi [para demonstran] gampang diatur, tidak bikin rusak. Saya kasi komando, ‘Kalau orang lawan, kamu boleh pukul, tetapi jangan sampai orang mati.’ Saya punya semangat dulu. Saya masih muda.¹¹

Kota kecil itu pun heboh. Bagi banyak warga, ‘demonstrasi’ itu tampaknya lebih seperti perang suku. Mereka menutup pintu rumah mereka dan tak bergeming di dalam sana. Raja Thomas memutuskan bahwa Jan Djong bukan Sang Pembebas melainkan hanya seorang *Mo’ang* Teka baru, dan sang raja melarikan diri ke laut dengan perahu sepanjang hari itu. Demonstrasi itu adalah sebuah pranata cangkokan – tidak sepenuhnya modern dan juga tidak sepenuhnya tradisional. Seorang

10 Daniel O’Connell (1775-1847), seorang orator politik istimewa dari Irlandia. Melalui sederatan demo damai besar-besaran ia memenangkan emansipasi Gereja Katolik dan hak orang Katolik untuk menjadi anggota parliamen Inggris (1829); dia sendiri terpilih sebagai anggota Parliamen Westminster pada tahun yang sama. Selanjutnya ia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Irlandia dari Inggris.

11 Wawancara dengan V.B. da Costa, Jakarta, tgl. 19 Agustus 2010.

cendekia menyebutnya sebagai 'pranata senjakala'.¹²

Boleh jadi sang Raja Sikka panik pada hari itu. Pembakaran dan baku pukul yang diperingatkan Sentis da Costa kepada Jan Djong justru telah terjadi sebelum demonstrasi itu. Kemarahan Jan Djong telah membara setidak-tidaknya selama lima tahun. Pada tahun 1948 ia dan beberapa orang lain pernah menggalang protes lain yang tak kalah gaduh di pinggiran Maumere. Sebuah jembatan dibakar. Polisi melepaskan tembakan agar massa dapat dikendalikan. Raja – yang adalah pemimpin dan sekaligus hakim pada masa itu – serta-merta melihat protes itu sebagai ledakan perkelahian yang tertidur sejak tahun 1920-an. Sang raja lalu menjatuhkan kepada Jan Djong dkk hukuman penjara selama enam bulan.

Begitu pula 'demonstrasi' tahun 1953 itu tidak berarti bahwa Djong telah meninggalkan tindak kekerasan dan menjadi pengikut Daniel O'Connell. Selama beberapa tahun terjadi pembangkangan hukum di mana para penggarong pengelana membakar dan merampok. Peristiwa ini dikenali sebagai periode 'bumi hangus'. Jan Djong niscaya pernah terlibat dalam sebagian darinya, karena pada tahun 1957 ia lagi-lagi dijatuhi hukuman, kali ini oleh pengadilan modern. Ia dijatuhi tiga tahun penjara lantaran menghasut tindak kekerasan.

Juga ada lembaga-lembaga informal lainnya. Kita cuma punya sedikit waktu untuk membuat sketsa perincian paling sederhana atas ketiga darinya. Cukuplah bila diajukan pertanyaan: Bagaimana lembaga-lembaga informal dan formal kewarganegaraan saling terkait? Apakah yang satu melemahkan dan menggerogoti yang lain, atau dapatkah keduanya juga bekerja sama untuk selamanya?

Organisasi Etnis

Lembaga informal lain adalah organisasi etnis. Lembaga ini pun adalah campuran antara yang lama dan baru. Di antara beberapa aksi demonstrasi itu – demonstrasi Juni 1953 itu bukan yang terakhir – dan

12 Christian Lund, 'Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa' *Development and Change* 37/4 (2006):hlm.685-705.

separuh mendorong pembakaran dan baku pukul, Jan Djong menjadi seorang politisi. Raja Sikka meninggal mendadak karena serangan jantung pada bulan Mei 1954, dan lembaga-lembaga republik mesti segera mulai mengisi kekosongan itu. Lembaga-lembaga tersebut mencakup DPRD serta para birokrat profesional dengan mandat terbatas secara hukum. Partai-partai politik kurang berkembang pada tahun 1950-an. Alat organisasi utama Djong adalah sebuah organisasi etnis bernama *Kanilima*. Nama ini adalah akronim dari tiga bekas kerajaan di wilayah perbukitan di sekitar Maumere yang telah kehilangan otonomi mereka lantaran dikebawahkan pada Raja Sikka pada tahun 1920-an – Kangaé, Nita dan Lio-Maumere. *Kanilima* adalah koalisi pedesaan melawan kaum elite perkotaan di Maumere. Para wakil ‘etnis’ yang tergabung di dalamnya tidak mengklaim keturunan aristokratik – mereka adalah para pejabat kelas menengah serta politisi seperti Jan Djong. Keluhan mereka juga terbilang modern. Mereka mencetuskannya karena merasa bahwa Raja Thomas merampas beasiswa negara dan jabatan birokrasi dari mereka. Protes mereka berhasil. Prinsip perwakilan etnis segera diresmikan. Jan Djong menjadi anggota dewan itu atas nama Kerajaan Kangaé, yang kini berganti nama menjadi ‘kelompok etnis’ Kangaé. Kelompok ini juga memenangkan kendali atas SMP Yapenthom yang didanai hasil kopra seperti dituntut dalam demonstrasi dari tahun 1953 itu. Ide baru bahwa urusan umum seperti keuangan dan pendidikan harus dijalankan oleh para anggota dewan terpilih secara luas diterima sebagai yang lebih unggul daripada hak prerogatif seorang aristokrat. Perdamaian kembali bersemi di wilayah Sikka, untuk sementara.

Demonstrasi dan organisasi etnis adalah dua contoh tentang lembaga-lembaga informal yang membantu mengaitkan negara dengan masyarakat. Pada saat ketika negara formal berkembang dengan cepat, lembaga-lembaga semacam itu memberi bentuk strategis kepada arena luas antara republik baru yang berbasis di Jakarta dan politik sehari-hari di berbagai kota kecil dan desa di Flores tengah itu. Partha Chatterjee dengan jitu menyebut arena ini sebagai ‘masyarakat politik’.¹³ Lembaga-

13 Partha Chatterjee, *Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy*. New York: Columbia University Press, 2011.

lembaga informal membantu menciptakan pengakuan timbal balik antara negara dan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memapankan semacam otoritas publik yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh para warga biasa daripada sebelumnya. Tentu saja tindak kekerasan masih menjadi masalah. Tetapi pada prinsipnya ini bukanlah lembaga-lembaga tindak kekerasan. Lembaga-lembaga ini lebih inklusif daripada eksklusif. Siapa pun bisa turut serta dalam demonstrasi. Semua orang dari wilayah pegunungan tadi berhak untuk merasakan diri mereka diwakili *Kanilima*.

Dana Kotor

Lalu bagaimana keadaan berubah menjadi begitu buruk di Maumere? Kita kini langsung beralih ke tahun 1959. Dua lembaga informal berikut muncul dalam konteks polarisasi yang kian meningkat. Ketika Jan Djong dibebaskan dari penjara berkat grasi presiden, ia masuk kembali ke arena politik. Ia tidak kehilangan segelintir pun keberaniannya, tapi ia tidak lagi menikmati keunggulan yang sama. Sejak saat itu serangkaian panjang manuver faksional di kota kecil, seperti permainan catur yang lambat, membuat dia secara bertahap kehilangan lebih banyak langkah daripada lawan-lawannya, hingga tiba hari mengerikan pada tahun 1966 itu ketika ia akhirnya diskakmat.

Lembaga-lembaga informal baru muncul serentak dengan lembaga-lembaga formal. Lebih banyak administrasi pemerintah datang ke kota itu, sebuah dewan terpilih, lebih banyak kalangan militer, lebih banyak gereja, dan (terutama nian) lebih banyak uang dari kopra. Semua lembaga formal ini sangat menggiurkan bagi sedikit elite kelas menengah di dan sekitar Maumere. Penampilan mereka melesakkan pertempuran segar untuk memegang kendali. Persaingannya ialah antara elite di kota – ‘etnis’ Sikka dan dekat dengan Gereja Katolik – dan elite berbasis desa dari luar kota. Jan Djong memimpin yang terakhir tadi.

Yayasan Kopra memiliki fungsi formal sebagai pengumpul dana pembangunan dan juga fungsi informal sebagai pengepul dana kotor. Secara formal, yayasan itu adalah bagian dari rencana aksi afirmatif pemerintah Jakarta untuk menyediakan peluang-peluang ekonomi bagi rakyat Indonesia asli. Nasionalisasi dan perusahaan milik negara adalah



*Yan Djong, Siswa SMP Seminari Mataloko, berumur k.l. 13 thn., (1930).
Arsip Provinsi SVD Ende, Buku I, Foto No. 04906.*

dua elemen penting dalam strategi itu. Flores hanya punya kelapa, sehingga Yayasan Kopra adalah hal utama. Yayasan itu dikelola secara demokratis melalui sejumlah komite berlapis. Laba yang dihasilkannya digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan hal-hal baik lainnya.

Pada saat yang sama, hasil yayasan itu menjadi dana kotor yang coba diraup tangan setiap politisi lokal. Para bos lokal memakainya untuk membeli kesetiaan dan dukungan. Berbagai skandal korupsi mulai merebak karena setiap klik berusaha mengenyahkan para saingan mereka. Dana kotor itu beserta patronase dan skandal korupsi yang terkait dengannya adalah salah satu lembaga informal paling penting yang muncul ketika itu.

Kita tidak punya waktu untuk perinciannya, tetapi pada awalnya koalisi desa ala Jan Djong ini cukup berhasil dalam soal dana kopra. Ia menggantang keberhasilannya berkat aliansi dengan seorang patron kuat dan terdidik bernama Laurens Say, yang mengolah sebagian besar perekonomian yang dikendalikan negara di Kabupaten Sikka. Tapi seiring berlalunya waktu sang patron faksional Djong mengalami semakin banyak kekalahan dalam pertempurannya melawan para saingannya yang berbasis di kota, dan pada akhirnya sang patron dipindahkan ke Jakarta. Kini tanpa perlindungan, Djong lebih gampang menjadi mangsa para seteru bagi mantan patronnya. Para saingannya (dipimpin bupati P. S. da Cunha)¹⁴ menggeser Jan Djong dari sirkuit politik dengan menunjuk dia ke posisi administratif di desa.

Kelompok Pemuda

Kunci terakhir lembaga senjakala dari era ini adalah 'kelompok pemuda'. Pada akhir tahun 1962 kabinet di Jakarta mengisyaratkan bahwa pemilu nasional mungkin akan diadakan pada tahun berikutnya. Hal ini memicu kesibukan aktivitas partai-partai yang saling bersaing di daerah itu. Semua partai politik mulai merekrut para warga desa, melalui berbagai organisasi sayap mereka.

14 Paulus Samador da Cunha (1924-1970) adalah bupati pertama di Kabuptan Sikka (1960-1967). L. Say (1924-2007) menggantikannya (1967-1977).

Jan Djong semakin terkucil dari kaum mapan Maumere. Ia mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan merekrut orang-orang muda ke dalam berbagai kelompok pemuda di desa. Ia tidak bergabung dengan partai politik mana pun, tetapi berteman dengan para pemimpin partai nasional sekuler PNI maupun Partai Komunis PKI. Sayangnya tidak banyak yang dapat ia tawarkan kecuali cerita-cerita lama tentang perlawanan heroik menentang raja dan janji-janji samar-samar tentang bantuan ekonomi dari Uni Soviet.

Sebaliknya, para saingannya yang berbasis di kota memiliki semua sumber daya mobilisasi Gereja Katolik di tangan mereka, juga di wilayah pedesaan. Heinrich Bollen, seorang pastor muda Jerman, tiba dan menetap di Watublapi, dekat desa Jan Djong. Bollen kelak menulis tentang kurun tersebut: 'dalam masyarakat harus dibangun kekuatan baru karena hampir semua Kepala Kampung adalah pengikut-pengikut Yan Djong. Mungkin dapat diperbuat sesuatu pada kalangan pemuda.'¹⁵ Ia menjadi nemesis Jan Djong. Sang pastor membawa serta uang Barat yang riil. Ia membagikan beasiswa kepada orang-orang Flores untuk belajar di Jawa. Dan mudika bentukan sang pastor itu mulai menentang para kaki tangan Jan Djong.

Otot pun mulai beradu kuat. Si Alo Gila, dengan jenggot ala Patrice Lumumba, adalah pendukung gigih Jan Djong. Sang pastor Jerman tadi juga memiliki satu orang serupa, seorang lelaki yang rumahnya pernah dibakar para antek Djong. Beberapa demonstrasi dan demonstrasi tandingan menyeruak semakin keras dan lebih agresif. Polisi akhirnya turun tangan. Beberapa rumah lagi-lagi dibakar, sejumlah kuda ditombak. Pastor Jerman tadi hanya berani berkeliling naik sepeda motornya sambil membonceng seorang tentara sebagai pengawalnya.

15 "Revolusi Watublapi Yang Membawa Selamat". Edisi bahasa Indonesia berupa manuskrip 33 hlm. Alihbahasa Robert Rewu, svd (Jakarta, 10 Juli 1979). Kutipan dari hlm. 16. Manuskrip asli dalam bahasa Jerman dan ditulis ketika Bollen mengikuti Kursus Tersiat SVD di Nemi, Roma, 1966. Lih. juga Heinrich Bollen, "Jan Jong – Die zeit der grossen Umwälzungen 1965", dlm *Als der Himmel den Menschen einmal nah war... Erzählungen aus Indonesien von Katharina Sommer*. Düsseldorf: Schäfer Verlag, 1992, hlm. 51-71.

Ketika saat Mengerikan itu Tiba

Saya harap Anda masih bersama saya, karena kisah ini akan berkelok secara dramatis. Di sini faksionalisme berubah menjadi pembunuhan berencana. Tanpa perubahan ini, persaingan niscaya lebih pahit, intrik menjadi tanpa ampun, tapi perkelahian faksional tadi akan jungkat-jungkit tanpa akhir. Pada akhirnya Jan Djong akan pensiun ke ladang para leluhurnya di kampung untuk merawat kemuliaan masa lalunya. Tidak, transformasi fatal itu tidak berasal dari lembaga-lembaga informal masyarakat – yang relatif tetap inklusif. Transformasi itu muncul dari lembaga-lembaga formal negara.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 sebuah peristiwa yang terjadi di Jakarta dengan cepat menyebabkan rezim berubah. Sekelompok kecil komplotan militer yang terkait dengan sekretaris jenderal Partai Komunis menculik beberapa jenderal Angkatan Darat. Penculikan itu tak berjalan seperti yang dirancang, dan sebagai serangan balik Jenderal Suharto yang antikomunis merebut kekuasaan. Ia segera melancarkan tindakan keras terhadap Partai Komunis, dengan memerintahkan pasukannya untuk membunuh atau memenjarakan jutaan kader partai itu di seluruh nusantara. Kejadian ini menjadi salah satu pembunuhan berencana utama dari abad ke-20. Namun kaum militer memerlukan para sekutu sipil lokal untuk mengenali dan menggelandang para korban. Ini berarti mengeksploitasi aneka faksionalisme di kota-kota kecil seperti di Maumere, seraya memperdalam faksionalisme itu hingga ke tubirnya yang terjauh: sebuah strategi yang sangat eksklusif.

Pada bulan Februari 1966, komandan militer di Maumere mulai menekan para politisi di kota itu untuk bergabung dengannya dalam menghukum mati semua lawan mereka, di antaranya para anggota dan simpatisan Partai Komunis. Pada awalnya mereka menolak, dengan mengatakan bahwa hukuman mati itu sama sekali bukan urusan mereka. Pada malam 27 Februari, sang mayor kodim memaksa para pemimpin politik kota itu untuk datang berkumpul di kediaman resminya. Pintu-pintu dikunci. Tentara bersenjata berdiri mengelilingi ruangan itu. Perasaan bergidik menyusum merayap pada para warga sipil itu tatkala

nama 24 ‘tersangka’ dibacakan. Ruangan itu lama senyap. Lalu seorang mengatakan: ‘Kita diharuskan memberantas G30S/PKI *sampai ke akar-akarnya*, jadi seorang pun tidak boleh diampun.’ Itulah saat mengerikan, dan salah satu dari mereka kelak menulis secara anonim, ‘Malam hari 27 Februari 1966 inilah merupakan detik-detik di mana pemimpin-pemimpin Katolik mulai kehilangan pegangan, atau dalam istilah yang lebih keras, bahwa mereka sudah meninggalkan prinsip-prinsip Katolik.’¹⁶

Pada malam itu juga mereka yang disebutkan namanya tadi dieksekusi. Dua hari kemudian kota itu mendengar bahwa Jan Djong dan seorang lain, mantan jaksa, dibunuh di penjara. Truk-truk mulai berdatangan dari desa-desa di Kabupaten Sikka. Dibutuhkan lebih dari satu tahun sebelum pembunuhan berencana itu diakhiri. Setidak-tidaknya 800 orang tewas.

Studi-studi Kewarganegaraan Pascapenjajahan

Begitulah akhir eksperimen pertama dalam kewarganegaraan pascapenjajahan di Indonesia – dengan penghancuran semua hak kewarganegaraan yang merupakan porsi terbesar publik di setiap kota dan desa di negeri itu. Tapi itu bukan akhir aneka perjuangan kewarganegaraan di Indonesia. Ada lebih banyak orang seperti Jan Djong, perempuan juga lelaki, dan tidak semua mereka bernasib serupa. Bahkan dewasa ini beberapa dari mereka memenangkan perjuangan demi hak-hak tersebut. Kesehatan untuk semua orang misalnya, dengan cepat menjadi hak warga negara yang secara umum diakui di Indonesia dewasa ini. Jutaan orang yang hidup di negara-negara pascapenjajahan di seluruh dunia ingin menjadi warga negara alih-alih ‘penduduk’ pasif – mengapa kita begitu sulit memahaminya?

Cukup mencengangkan bahwa studi-studi kewarganegaraan pascapenjajahan adalah sebuah ranah baru penelitian. Salah satu program penelitian semacam itu baru saja dimulai di sini di Belanda – sebagian besar para penelitinya hadir di sini pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan kita pelajari, tapi saya berharap bahwa kita akan meningkatkan

16 Anonim. “Menjaring Angin: Kronik Percaturan Politik Di Maumere, NTT, Jelang, Selama Dan Pasca Pembantaian 20 Pebruari – 29 April 1966.” Ende, 1974. Manuskrip ini, yang beredar di Maumere dalam bentuk fotokopi, menjadi salah satu sumber utama bagi penulis.

pemahaman tentang relasi negara dan warga di sebagian besar dunia ini, dalam dua cara.

Pertama, studi-studi kewarganegaraan pascapenjajahan menyajikan penglihatan ‘dari dalam’, penilikan dari bawah apa adanya. Studi-studi itu membawa orang-orang biasa masuk kembali ke dalam studi-studi tentang negara. Studi-studi konvensional tentang masyarakat sipil dan demokrasi liberal terlalu sering menggambarkan kegiatan-kegiatan sebuah kelas menengah atas beserta lembaga-lembaga di mana mereka berada di rumah. Dengan mengamati berbagai relasi aktual yang dijalin orang-orang biasa dengan lembaga-lembaga negara, maka studi-studi kewarganegaraan pascapenjajahan membantu kita menghindari ‘gugusan ketiadaan’ dari studi-studi kewarganegaraan konvensional. Relasi-relasi tersebut seharusnya membantu kita bereaksi sedikit kurang sombong ketika kali berikut kita melihat sekumpulan orang di TV di sebuah tempat entah di entah yang mengatakan bahwa mereka ingin menjadi warga dari negara mereka.

Kedua, studi-studi kewarganegaraan pascapenjajahan membantu kita keluar dari kebuntuan bahwa pandangan ‘dari luar’ telah menyebabkan, lantaran penekanannya, bahwa hanya lembaga-lembaga formal yang terpenting. Sebaliknya, memusatkan perhatian pada zona ‘senjakala’ yang lebih besar tapi kurang dipahami antara negara dan masyarakat seharusnya berujung pada kejutan-kejutan. Lembaga-lembaga informal tidak selalu buruk untuk kewarganegaraan sejati seperti yang selama ini kita pikirkan. Bahkan lembaga-lembaga formal seperti militer bisa saja jauh lebih problematis. Lembaga-lembaga informal terdapat berlimpah ruah dalam semua kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas kelembagaan formal yang rendah dan pembangunan ekonomi yang lemah – yang sebenarnya merupakan bagian terbesar dunia. Lembaga-lembaga tersebut barangkali mengejawantahkan kewarganegaraan pascapenjajahan yang sejati.

Hanya penelitian lapangan cermat yang dapat menghasilkan wawasan nyata di sini. Saya berharap dapat mendayagunakan posisi saya sebagai Guru Besar Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia Tenggara di Universitas

Amsterdam guna mendukung pengajaran dan penelitian tentang hal ihwal sehari-hari namun belum terpetakan secara baik di mana para warga di negara-negara pascapenjajahan menegaskan keinginan mereka untuk turut serta dalam negara mereka. Berbagai gagasan dengan mobilitas yang sangat tinggi merupakan bagian dari campuran tersebut, dan itulah alasannya mengapa saya merasa beruntung untuk ambil bagian dalam kelompok *Moving Matters* di universitas ini. Kelompok ini tertarik pada mobilitas lintas batas di antara beragam manusia, barang dan gagasan.

Terima kasih.

Akhir kata, kepada kawan-kawan di Indonesia saya ucapkan banyak terima kasih. Kendati terlalu banyak untuk disebutkan nama mereka satu persatu, namun teman-teman saya di Indonesia tidak pernah berhenti menantang saya untuk berani berharap lebih jauh lagi. Dunia kalian itulah, yang masih dicirikan oleh lebih banyak 'yang tidak mempunyai' daripada 'yang mempunyai', yang mengilhami karya-karya saya di Amsterdam. Merdeka!

Daftar Rujukan:

- Anonim, "Menjaring Angin: Kronik Percaturan Politik di Maumere, NTT, Jelang, Selama dan Pasca Pembantaian 20 Februari – 29 April 1966." Ende 1974.
- Bentara*, "Kundjungan Wk. Presiden Hatta", 15 Mei 1952.
- Bentara*, "Soal tuan-tuan tanah", 1 Juli 1952.
- Bentara*, "Hapuskanlah feodalisme di Flores!", 15 November 1952.
- Djong, J., P. Padang & V.B. da Costa, Surat "Permohonan idzin guna mengadakan satu demonstrasi" kepada Kepala Pemerintahan Setempat, dan Kepala Kepolisian Setempat, Maumere, Juni 1953.
- Bollen, Heinrich, "Revolusi Watublapi Yang Membawa Selamat". *Manuskrip* 33 hlm. Asli bahasa Jerman, Nemi, Roma 1966. Edisi bahasa Indonesia dikerjakan oleh Robert Rewu, SVD (Jakarta, 10 Juli 1979).
- Chatterjee, Partha, *Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy*. New York: Columbia University Press, 2011.

Helmke, Gretchen, & Steven Levitsky, 'Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda.' *Perspectives on Politics* 2/4 (2004):hlm.725-740.

Isin, Engin F. & Bryan S. Turner (eds.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage, 2002.

Lund, Christian, 'Twilight Institutions: Public Authority and Local Politics in Africa.' *Development and Change* 37/4 (2006):hlm.685-705.

Wawancara dengan V.B. da Costa, Jakarta, 19 Agustus 2010.

Naskah asli: Gerry van Klinken, 'Murder in Maumere: Postcolonial Citizenship', Inaugural address on the author's appointment as Professor of the Social and Economic History of Southeast Asia, at the University of Amsterdam, on 2 October 2013.

Alih bahasa: Yosef Maria Florisan.